

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH
ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh:

Arief Munandar
NPM. 1221020008
Jurusan: Jinayah Siyasah

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1437 H/2017 M

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH
ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Arief Munandar
NPM: 1221020008**

Jurusan : Jinayah Siyasah

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK
SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH
ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh
Arief Munandar

Di Indonesia semakin banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, baik masih dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan. Dan penulis ingin mengetahui Bagaimanakah Ketetapan Sanksi Hukum Positif di Indonesia terhadap Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Sanksi Pembunuhan Anak oleh Orang Tua menurut Ketetapan Hukum Positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif alasannya karena data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan baik berdasarkan data-data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulannya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Fiqih dan Buku Tafsir dan norma-norma lainnya, dan data sekunder yang terdiri dari : Buku-buku Umum, karya atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada hukum pidana positif dengan adanya KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT, menghasilkan sanksi yang berbeda-beda. Pada KUHP : sanksi bagi orang tua yang membunuh anaknya dipidana paling singkat 7 (tujuh) tahun penjara dan paling lama 9 (sembilan) tahun penjara, dalam UU Perlindungan Anak : sanksi bagi orang tua yang membunuh anaknya dipidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda Rp.200.000,000,- . dan diperberat sepertiga, jika pelaku adalah orang tuanya, dan dalam UU Penghapusan KDRT : sanksi bagi

orang tua yang membunuh anaknya dipidana 15 (lima belas) tahun penjara atau denda Rp.45.000.000,-. Perspektif hukum Islam terhadap sanksi hukum pada orang tua yang membunuh anaknya yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia yang telah dibahas. Di dalam ketentuan hukum *qishas*, orang tua yang membunuh anaknya tidak *diqishas* karena orang tua menjadi sebab adanya anak,, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang, karena itu orang tua tetap mendapat hukuman yaitu berupa *ta'zir*. Namun karena negara ini tidak menerapkan sistem pemerintahan Islam jadi jika ada tindak pidana yang terjadi tidak dihukum secara Islam namun dihukum menurut undang-undang yang berlaku.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarampe Bandar Lampung, Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT
HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Arief Munandar
NPM : 1221020008
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syariah



Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam siding
Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr.Siti Mahmudah S.Ag.,M.Ag
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II

Dr. Jayusman, M.Ag
NIP.197411062000031002

Ketua Jurusan Jinayah Siyasah

Drs.Susiadi AS., M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", disusun oleh Nama : **Arief Munandar** NPM : **1221020008**, Jurusan : **Jinayah Siyasah**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Pada Hari / Tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I (.....)

Sekretaris : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy (.....)

Penguji I : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I (.....)

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag (.....)



Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum

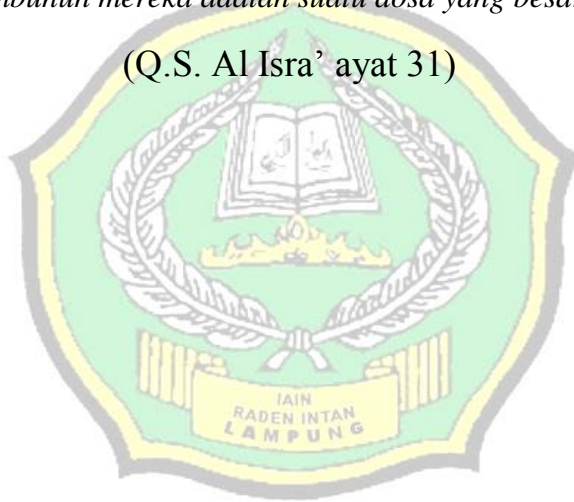
Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

(Q.S. Al Isra' ayat 31)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Papahku tercinta Darwis Erhanoto dan mamahku tercintaWartiningsih, terima kasih mamah papah atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada mamah dan papah.
2. Adik tercinta Deby Yusril Wardana yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah juga dikabulkan mimpi dan cita-citamu, semoga kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan.
3. Kepada sanak saudara dan famili yang terus mendoakan keberhasilanku, memberikan semangat dan bantuan secara materil maupun formil dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

ARIEF MUNANDAR dilahirkan di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada tanggal 13 Juni 1993, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Darwis Erhanoto dan Ibu Wartiningsih. Adapun riwayat pendidikan, sebagai berikut:

1. TK DarmaWanita kibang, lulus pada tahun 1999
2. SD Negeri 2 Kibang, lulus pada tahun 2005
3. SMP Negeri 3 Kota Metro, lulus pada tahun 2008
4. SMA Negeri 2 Kota Metro, lulus pada tahun 2011
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah (Hukum Pidana & Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

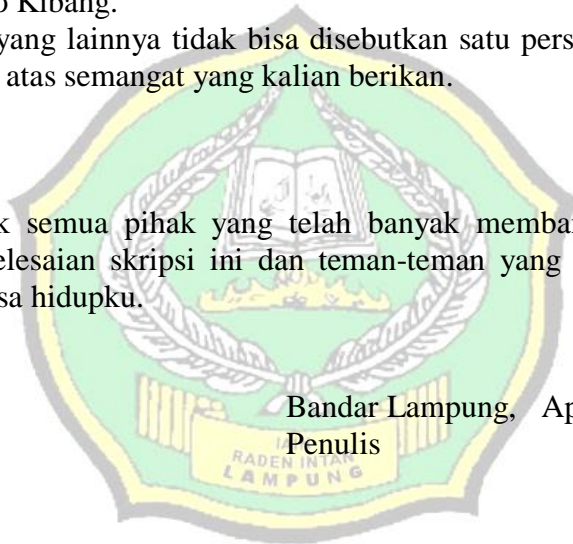
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Karena saran, koreksi dan kritik yang proposional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden IntanLmpung
3. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Frenki,M.Si. selaku sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., selaku pembimbing I, dan BapakDr. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Selaku penguji I dan Bapak Selaku penguji II, yang telah menyediakan waktu dan fikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku, kakak, adik, sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua
8. Sahabat superku Melly Listiana, KinantiSuryani, M Galib Iqbal, Sultan Tirta, FaizAfrizal, Ahmad ferdian, SulistiyoAdi, Ruslan Abdul Gani, Budi Santosa, AgungRamadhani, Wahyu Saputra, Merlia Anggraini, Voni Afranida, Hendro Suseno, Andri Pratama, Billy Husain, Tori Sandika, Arif wahyudi dan teman-teman yang ada di Metro Kibang.
9. Dan yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.



Bandar Lampung, April 2017

Penulis

Arief Munandar
1221020008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8

BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana	14
C. Asas-asas Hukum Pidana Islam	22
D. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Islam .	31
E. Tindak Pidana Pembunuhan Anak menurut Hukum Islam.....	41
F. Tindak Pidana Pembunuhan atas Janin	44

BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana	47
B. Bentuk-bentuk Tindak pidana	51
C. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Positif di Indonesia.....	54
D. Tindak Pidana Pembunuhan Anak menurut Hukum Positif di Indonesia	61

BAB IV ANALISIS

- A. Ketetapan Sanksi Hukum Positif di Indonesia terhadap Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua 65
- B. Perspektif Hukum Islam terhadap Sanksi Pembunuhan Anak oleh Orang Tua menurut Ketetapan Hukum Positif di Indonesia..... 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah **SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu adanya penegasan judul tersebut.

1. Sanksi adalah ancaman hukuman atau satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum.¹
2. Tindak Pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP.²
3. Pembunuhan dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara material, yang secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.³
4. Anak adalah seseorang dalam lingkup rumah tangga, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah dilahirkan.⁴
5. Orang Tua adalah ayah atau ibu kandung.⁵
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku

¹ M.Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Realyta Publisher Cet. 1,2009), h.552.

² Ahmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.109

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditma, 2010), h.68

⁴ M.Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum (Hukum Pidana Luar Kodifikasi)*, (Surabaya: Reality Publishier, 2009), h.41.

⁵ *Ibid*, h.470.

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, yang dimaksud disini hukum Islam adalah segala aturan yang terdapat di dalam Fiqih.⁶

7. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu Negara pada saat tertentu. Misalnya KUHP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Jadi, dari penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah barang siapa yang melakukan unsur-unsur tindak pidana seperti dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang apalagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif
 - a. Banyaknya tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri di Indonesia.
 - b. Untuk persoalan tindak pidana pembunuhan anak kandung oleh orang tuanya, penulis ingin mengetahui sanksi hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana tersebut.
2. Alasan Subyektif
 - a. Banyak tersedianya buku penunjang untuk memenuhi kebutuhan ini serta membahas permasalahan ini,

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9

⁷ M.Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum (Hukum Pidana)*, (Surabaya:Reality Publishier, 2009), h.270.

sehingga nantinya penulis dapat selesai tepat pada waktunya.

- b. Pokok bahan proposal ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa.

C. Latar Belakang Masalah

Pada jaman sekarang ini, banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak tersebut melayang. Sangat sulit dipercaya ketika seorang anak meninggal ditangan orang yang sangat diharapkan untuk dapat melindungi dan menjaga dirinya.

Fenomena saat ini adalah contoh atau bukti dari tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga sendiri, bahkan marak sekali orang tua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Anak rawan (*children of risk*) mengalami tindak pidana karena anak mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik yang mengakibatkan matinya anak dan hal itu dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya seperti anak dari keluarga miskin, anak dari daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang retak (*broken home*). Seperti kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri yang terjadi di Ciamis, seorang ayah berinisial ES (45th), warga dusun Tamansari desa Kertahayu kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis Jawa Barat, tega membunuh anak kandungnya sendiri Neni Wahyuni, yang baru berusia 11 tahun. Sebelum membunuh pelaku sempat mengajak korban untuk bunuh diri empat hari yang lalu lantaran frustrasi dengan rumah tangganya yang berantakan setelah sang

istri hamil hingga melahirkan ketika bekerja menjadi TKW di Brunei Darussalam.⁸

Sedangkan untuk contoh kasus aborsi yang sempat menggemparkan adalah kasus dr. Edward Armando yang dikenal sebagai Raja Aborsi yang praktik di Jalan Dukuh Kupang Timur X/4, Surabaya. Pria yang pernah mendekam di Medaeng itu kembali ditangkap polisi. Dokter Edward Armando (66), diringkus jajaran Polres Sidoarjo, Selasa lalu dengan sangkaan kembali melakukan praktik aborsi ilegal. Pasien dr Edward diperkirakan lebih dari 2.000 orang. Diperkirakan, sejak praktik mulai Januari 2008 lalu hingga jelang ditangkap, pasien yang telah ditanganinya mencapai 2.000 orang lebih, ujar Kepala Polres Sidoarjo AKBP M Iqbal didampingi Kasat Reskrim AKP Ernesto Saiser, di Mapolres Sidoarjo, Kamis (3/2/2011) kemarin. Dalam pengakuannya kepada polisi, dr Edward menerima pasien di tempat praktiknya antara 20-25 orang setiap pekan. Dia tidak pernah mematok tarif tertentu. Tarif aborsi akan dipungutnya setelah dirinya mengetahui kondisi ekonomi calon pasiennya. Jika si pasien menyatakan dirinya orang tidak mampu, maka dr Edward memungutnya maksimal Rp 500.000. Karena mereka (para pasien) mengaku tidak kuat ke dokter spesialis, maka saya menolongnya, ucap Edward. Meski begitu, polisi menyebut dr Edward memungut tarif antara Rp 1,5 juta - Rp 4 juta. Diduga, tarif sebesar itu karena calon pasien tidak langsung berhubungan dengan dr Edward, tetapi melalui anak buahnya yang berperan sebagai calo aborsi kandungan. Saya hanya ingin menolong orang kok, tidak korupsi, kilah dr Edward soal praktik aborsi yang dijalankannya. Sepak terjang dr Edward di dunia aborsi memang sudah dikenal cukup lama. Sejak mendirikan tempat praktik pada 1995, ia menerima ribuan pasien. Ia pernah dua kali diperingatkan Departemen Kesehatan, bahkan tiga kali diringkus polisi dan divonis penjara satu tahun. Namun, semua itu tak membuatnya

kapok. Edward beralih, dirinya kerap menolong karena disambangi pasien tidak mampu. Pasangan suami istri yang ingin menggugurkan kandungan biasanya karena dihipit ekonomi. Mereka datang dengan alasan sudah tidak ingin punya anak, dengan menjalani KB (keluarga berencana), namun tetap hamil. Disambati seperti itu ya saya tolong, kilah dr Edward. Saat diringkus jajaran Satreskrim Polres Sidoarjo, Edward diketahui baru saja mengaborsi sekitar 10 pasien, lima pasien di pagi hari dan lima lainnya di siang hari. Salah satunya bernama Heny Kusumawati, mahasiswi sebuah akademi kebidanan di Malang. Warga Desa Sukosewu RT 3/RW 1, Kecamatan Gandusari Blitar itu menggugurkan kandungannya yang berusia dua bulan, di tempat praktik dr Edward, Selasa pukul 15.45 WIB. Selain menetapkan dr Edward sebagai tersangka, polisi akhirnya juga menetapkan Heny Kusumawati, Rendy Saputra (pacar Heny dan mahasiswa PTS di Malang), serta Eddy Soemardiono, bapak Rendy Saputra yang turut menyuruh agar Heny menggugurkan kandungannya, sebagai tersangka.⁹

Melihat dari contoh di atas, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam KUHP Bab XIX Kejahatan terhadap nyawa pasal 338 yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan untuk pembunuhan anak oleh orang tuanya kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam KUHP, berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan

persetujuan wanita yang mengandung tersebut. Ketentuan mengenai tindak pidana aborsi dapat dijumpai dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu pada Pasal 299, Bab XIX Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346-349 KUHP.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Dalam Islam semua perbuatan (tindakan) mengandung balasan, baik berupa pahala ataupun sanksi hukuman di dunia dan di akhirat. Segala tindakan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan sebutan *Jarimah* atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zir*.¹¹ Secara tekstual telah ada kejahatan yang ditetapkan *syari'at* yang disebut *jarimah hudud*. Penetapan perbuatan pidana dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat¹². Salah satu jarimah yang telah ditetapkan Allah dalam nash-Nya adalah *jarimah qisas* (pembalasan) dan *diyat* (ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹³

Mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam ada tiga bentuk tindak pidana pembunuhan, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, h.108

¹¹ Mawardi, *Al ahkam as- Sultaniyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Habibi wa Auladauh, 1989),h.219.

¹² Abdul al wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Kuwait: Dar al Qalam, 1988),h.198.

¹³ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.275.

1. Pembunuhan yang disengaja,
2. Pembunuhan yang tidak disengaja,
3. Pembunuhan semi sengaja.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis mengenai sanksi pidana pembunuhan menurut hukum Islam yaitu:

1. Sanksi asli (pokok), berupa hukuman qisas,
2. Sanksi pengganti, berupa diyat dan ta'zir,
3. Sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.¹⁴

Dari penjelasan tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, maka dapat dipahami bahwa alasan yang melatarbelakangi penulis untuk membahas tentang tindak pembunuhan ini adalah:

1. Banyaknya tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri di Indonesia.
2. Belum ada pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Dengan alasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis akan membahasnya dengan judul **Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Sendiri Menurut Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hukum Islam.**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketetapan Sanksi Hukum Positif di Indonesia terhadap Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua?

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* cet. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.9.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Sanksi Pembunuhan Anak oleh Orang Tua menurut Ketetapan Hukum Positif di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak lepas dari beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah :

- a. Ingin mengkaji dan menganalisa bagaimana ketetapan sanksi hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya.
- b. Ingin mengetahui perspektif hukum islam terhadap sanksi pembunuhan anak oleh orang tua menurut ketetapan hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan pada umumnya dan tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis, sebagai menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang dampak atau akibat tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, alasannya karena data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan (data kualitatif). Data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan baik berdasarkan data-data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulannya atau dapat juga disebut dengan deskriptif.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif, yakni penyusun menguraikan secara sistematis pandangan tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri yakni sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri dalam tata hukum positif di Indonesia dan selanjutnya ditinjau menurut hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan proposal ini.

Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Fiqih dan Buku Tafsir dan norma-norma lainnya.

¹⁵ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T Grafindo Persada, 2006), h.35.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti: Buku-buku Umum, karya atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu: Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut Hukum Positif di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami, serta membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan seluruhnya adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis masalah berdasarkan data-data yang didapat dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang didapat dari buku-buku, karya, literatur atau norma-norma dengan bersifat penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan masalah yang ada, mencari data-data yang relevan, menyeleksinya dan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Setelah data terkumpul, penulis akan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang pendapat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mengenai sanksi terhadap pelaku pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri.





BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana menurut Hukum Islam

Istilah tindak pidana di dalam hukum Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisash*.¹⁷ Sedangkan menurut bahasa, *jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang di benci oleh manusia.¹⁸

Perbuatan yang dilarang (مَنْظُورَاتٌ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz syari'ah (شَرِيعَةٌ) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangan nya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ ۖ

¹⁷ H.A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), h.1.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa Al 'Uqbah fi Al fiqh Al Islamiy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 1992), h. 22.

Artinya : Pada dasarnya semua perkara di bolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁹

Sedangkan jarimah, menurut Imam Mawardi adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ
Artinya: Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.²⁰

Dengan melihat beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah* adalah sama.

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Menurut Ahmad Hanafi, di dalam hukum pidana Islam, bentuk-bentuk tindak pidana atau *jarimah*nya (*jinayah*) dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Dilihat dari berat atau ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang di ancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (masyarakat). Ciri khas *Jarimah Hudud* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukunya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol.

¹⁹ Jalaluddin As Syuyuthi, *Al Asybah wa An Nazhair*, (Kairo: Dar Al Fikr AlAraby, 1987), h.43

²⁰ Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah* (cet.III), (Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1993), h. 219.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut :

hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.²¹

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang di wakili oleh negara.

Adapun jarimah *hudud* ini terbagi menjadi tujuh (7) macam. Yakni :

- a) *Jarimah Zina* adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan di lakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *subhat*.
- b) *Jarimah Qazdaf* adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan.
- c) *Jarimah Syurb al- khamr* adalah meminum minuman yang memabukkan.
- d) *Jarimah Sariqah* adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak ada paksaan.
- e) *Jarimah Hirabah* adalah sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.
- f) *Jarimah Murtad* adalah keluarnya seseorang dari agama Islam.
- g) *Jarimah Al Baghyu* adalah sekelompok orang yang menentang imam dan wakil-wakilnya.²²

²¹ Mahmud Syaltut, *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (cet III). (Dar Al Qolam, 1996), h.296.

b. *Jarimah Qishash dan Diat*

Jarimah Qishash dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (masyarakat) , sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Dan adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut: Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun ciri hasnya *jarimah qishash* dan *diyat* adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa koban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Adapun *jarimah qishash* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang pembunuh itu sengaja memukul orang lain dengan senjata.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan yaitu pembunuhan yang tidak ada niat membunuh atau memukul sama sekali.
- 4) Penganiayaan sengaja yaitu segala jenis penyerangan terhadap jasad manusia seperti

²² Abdul Qadir Audah, *op cit*, h.79.

memotong anggota badan, memukul, akan tetapi nyawa orang tersebut masih tetap dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

- 5) Penganiayaan tidak sengaja yaitu pukulan dengan sesuatu yang bukan senjata tajam yang dilakukan tanpa sengaja.²³

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang di ancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Juga diartikan *Ar rad wa Al Man'u*²⁴, artinya menolak dan mencegah, akan tetapi menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh imam Mawardi yakni : *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan hukumannya oleh syara'.²⁵

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada Ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang- undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

2. Dilihat dari niat pelaku, yaitu:

a. *Jarimah sengaja*

Jarimah sengaja menurut Muhammad Abu Zahrah adalah suatu *jarimah* yang di lakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia

²³ Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî' al-Janâ'î al-Islâmî* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1992), h.663.

²⁴ Abdul Aziz 'Amir, *At Ta'zir fi As Syari'ah Al Islamiyah* (cet.IV), (Dar Al Fikr Al Araby, 1999), h. 52.

²⁵ Mawardi, *op cit*, h.236.

mengetahui bahwa perbuatan tersebut di larang dan di ancam dengan hukuman.²⁶

b. Jarimah tidak sengaja

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja adalah jarimah di mana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya.

3. Dilihat dari cara mengerjakannya, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Jarimah positif (*jaroo imu ijaabiyyatu*)

Pengertian jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan.

b. Jarimah negatif (*jaroo imu salbiyatu*)²⁷

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang di perintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

4. Dilihat dari orang yang menjadi korban, yaitu:

a. Jarimah perseorangan (*jaroo imu dhiddul afradi*)

Pengertian jarimah perseorangan adalah suatu jarimah yang hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat.

b. Jarimah masyarakat (*jaroo imu dhiddul jama'ati*)

Pengertian jarimah masyarakat adalah suatu jarimah yang hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op cit.*, h.143.

²⁷ Abdul Qadir Audah., *op cit.*, h.86.

sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat, juga menyinggung seseorang.

5. Dilihat dari sifat kekhususannya, yaitu;

a. Jarimah biasa (*jaroo imu 'adiyyatun*)

Jarimah biasa adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan politik.

b. Jarimah politik (*jaroo imu siyasatun*)

Jarimah politik, sebagaimana di kemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Di dalam suatu tindakan ataupun perbuatan pasti ada unsur-unsur yang menyertainya. Keberadaan unsur-unsur ini sangat penting agar dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak pidana atau tidak. Menurut Ahmad hanafi dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana menjelaskan bahwa unsur-unsur umum pada tindak pidana didalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga), yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya atau disebut dengan unsur formal atau Rukun Syar'i.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut dengan unsur materiil atau Rukun Maddi.
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut dengan unsur moril atau Rukun *Adabi*.

Ketiga unsur diatas harus ada didalam suatu *jarimah*, akan tetapi akan ada juga penambahan unsur-unsur dalam tiap *jarimah* secara khusus sehingga unsur-unsur khusus ini berbeda-beda pada bilangan dan macamnya.

Pada setiap aturan hukum yang dilanggar pasti ada ancaman hukuman yang mengiringinya. Pada hukum pidana Islam, hukuman dimaksud untuk memelihara, menciptakan kemaslahatan manusia dan ditetapkan untuk memperbaiki tiap-tiap orang agar dapat menjaga masyarakatnya.

Tujuan pokok penjatuhan hukuman didalam hukum pidana Islam ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan, artinya menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya karena dia mengetahui hukuman terhadap *jarimah* tersebut.
2. Pengajaran serta pendidikan, artinya memberikan pelajaran bagi pelaku dan orang lain tentang suatu *jarimah* sehingga dapat menahan orang lain untuk tidak melakukannya.²⁸

Menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana Islam hukuman itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan dilihat dari segi tinjauannya, yaitu:

1. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain:
 - a. Hukuman pokok (*uqubah asliyah*) yaitu hukuman asal bagi satu *jarimah*. Seperti hukuman potong tangan untuk pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) yaitu menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokoknya tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishas*.
 - c. Hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya.
 - d. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok sengan

²⁸ Ahmad Hanafi, MA, *opcit*, h.191.

syarat ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan antara hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam penentuan berat ringannya hukuman:
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas artinya tidak ada batas tertinggi atau terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had.
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi atau terendah, di mana hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut.
3. Ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan:
 - a. Hukuman yang telah ditetapkan macam dan besarnya dan hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi ataupun ditambah atau bahkan diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*uqubah lazimah*).
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya atau dapat disebut dengan hukuman pilihan (*uqubah mukhayyah*).
4. Ditinjau dari segi sasaran/tempat dilaksanakannya hukuman:
 - a. Hukuman badan artinya hukuman dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, penjara dll.
 - b. Hukuman jiwa yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang bukan badannya, seperti ancaman dan teguran.
 - c. Hukuman harta yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada harta seseorang, seperti perampasan harta dan denda.

5. Ditinjau dari macamnya jarimah yang diancamkan hukuman:
 - a. Hukuman hudud yaitu hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah atau tindak pidana hudud.
 - b. Hukuman qishas-diyat, yaitu hukman yang telah ditetapkan untuk jarimah qishas-diyat.
 - c. Hukuman kifarar yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas-diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
 - d. Hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah atau tindak pidana ta'zir.

C. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Dalam pelaksanaan hukum pidana ada beberapa asas dalam hukum pidana Islam. Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti alas atau landasan. Asas hukum islam berasal dari alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Hal demikian dapat diketahui bahwa asas –asas hukum Islam meliputi ²⁹:

1. Asas-Asas Umum

Asas-asas hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas tersebut, Allah mengungkapkannya di dalam Al-Quran lebih dari 1.000 kali,

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, h.114.

terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Diantaranya adalah dalam surat Shadd (38) ayat 26 yaitu:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Al-Quran:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barang siapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al Isra' : 15).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ
بِهِ ذُو عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ
مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه ۗ عَفَا
اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

أَنْتِقَامٍ ﴿١٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan

binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.S Al Ma'idah : 95)

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya di pertimbangkan asas kemanfa'atannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Asas ini berdasarkan Al-Quran surah Al Baqoroh (2) ayat 178 yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang

dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan surat dalam Al-Quran yaitu :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan*

meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al Isra' : 15).

قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَتُنْكُمُ
لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Katakanlah: Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah: Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah? Katakanlah: Aku tidak mengakui. Katakanlah: Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). (Q.S. Al-An'am:19)

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat dalam Al Quran :

Surat Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surah Al-Faatir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا
يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا
يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya : Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka

tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).

Surat Az-Zumar ayat 7:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

Artinya: Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya, dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.

Surat An-Najm ayat 38:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٣٨﴾

Artinya : Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Surat Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,*

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang di tuduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

Pada setiap aturan yang dilanggar pasti ada ancaman hukuman yang mengiringinya. pada hukum pidana Islam, hukuman dimaksudkan untuk memelihara, menciptakan kemaslahatan manusia dan ditetapkan untuk memperbaiki tiap-tiap orang agar dapat menjaga masyarakatnya. Tujuan pokok penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1. Sebagai pencegahan, artinya menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya agar ia tidak terus menerus melakukannya karena ia mengetahui hukuman terhadap jarimah tersebut.
2. Sebagai pengajaran serta pendidikan, artinya memberikan pelajaran bagi pelaku dan orang lain tentang suatu jarimah sehingga dapat menahan orang lain untuk tidak melakukannya.³⁰

³⁰ Ahmad Hanafi, M.A, *Op.Cit*, h.191.

D. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Islam

Di dalam sejarah kehidupan umat manusia, pembunuhan pertama dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Peristiwa tersebut dijelaskan oleh Allah didalam Al-Qur'an:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ
مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ^ط قَالَ
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ
لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ
فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ
كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ
مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي ^ط فَأَصْبَحَ مِنَ
الْنَادِمِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: (27) Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka

diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): Aku pasti membunuhmu!. berkata Habil: Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa. (28) Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. (29) Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. (30) Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. (31) kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. berkata Qabil: Aduhai celaka Aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.

Sebagai tindakan pidana yang pertama kali dilakukan antar umat manusia, Allah menetapkan hukuman yang sangat tegas, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 45 :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ج



Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishasnya), Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.³¹ Sedangkan menurut Abdul Qadir, Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishash-diyat* (tindakan pidana yang

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (cet. III), (Damaskus: Dar al-Fikr Jilid IV, 1989), h.217.

³² Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al - Jina'i al -Islami Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992), h. 6.

bersanksikan hukum *qishash* atau *diyat*). Dan dengan penerapan *qishash* dan *diyat* masyarakat akan bersih dari tindakan pidana yang dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengganggu stabilitas masyarakat.

Bentuk - bentuk tindak pidana pembunuhan dibedakan, menjadi 3 macam yaitu:

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Hukumannya wajib *qishas*, nantinya si pembunuh wajib dibunuh juga, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dengan membayar *diyat* (denda) atau dimaafkan sama sekali.³³

2. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja (*Khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan tidak menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Hukumannya tidak wajib *qishos* tetapi wajib membayar denda (*diyat*) ringan dan diangsur dalam 3 tahun. Sebagai contoh seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.

3. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan Semi Sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seorang guru memukulkan sebuah penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan pembunuhan semi sengaja (*syibhu al -amd*). Bentuk ini tidak wajib *qishos* tetapi wajib membayar *diyat* berat dan dapat diangsur hingga 3 tahun.

³³ Prof.Dr.H.Zainudin Ali,M.A. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), h.24.

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam ada beberapa jenis. Garis besarnya adalah hukum itu terdiri hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan adalah *qhisas*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah diyat dan jika sanksi *qhisas* atau diyat itu dimaafkan maka akan ada hukuman *ta'zir* dan hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu

1. Sanksi Asli/Pokok

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan Hadis adalah *qhisas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *qhisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarah.³⁴

Hukuman bagi orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعَظِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya : Dan Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI , nomor 261

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS.An-Nisa:93).

Qishas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya qishas adalah demi keadilan dan kemaslahatan.³⁵ Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam sebuah ayat:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S Al Baqarah :179)

Qishas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qishas.³⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

³⁵ Ibid., VI, nomor 264

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, IV, h.276.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Albaqoroh:178).

2. Sanksi Pengganti

a. Diyat

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *qishas*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu mereka menghendaki *qishas*, maka dilaksanakan hukum qisas, tapi jika menginginkan diyat, maka wajiblah pelaku membayar *diyat*.

Definisi diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut '*Irsy*. Dalil disyariatkannya diyat adalah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.An Nisa:92)

Pada mulanya pembayaran diyat menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Sedangkan diyat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu diyat *mugallazah* dan diyat *mukhaffafah*. Adapun diyat *mugallazah* menurut jumur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut *Malikiyah*, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila

waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.³⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa diyat pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena diyat merupakan pengganti qishas. Jika qishas dilakukan sekaligus maka diyat penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal '*amid* pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya '*amid* membayar diyat dengan hartanya sendiri bukan dari '*aqilah*, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi '*aqilah*.³⁸

Para ulama sepakat bahwa diyat pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. '*Aqilah* tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

b. Ta'zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila keluarga korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena qishas itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk ta'zirannya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.³⁹

c. Sanksi Penyerta/Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk *sadd az-zara'i* (agar seseorang tidak

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI : h.304.

³⁸ *Ibid* : h.307.

³⁹ Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI : 291-292 dan 312-313.

tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegarakannya dengan cara membunuh), selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar kifarah, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. Kifarah tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Kalau tidak bisa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang dikutip di atas dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu: Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka diwajibkan kepadanya hukuman *qishas*, namun apabila wali si terbunuh atau korban memberikan ampunan, hendaklah membayar *diyat* pada keluarga korban. Dan dikenakan *diyat* berat yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Dan alangkah utamanya apabila wali korban memaafkannya.
2. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu:
 - a. *Diyat* ringan, yang dibebankan atas keluarga pembunuh untuk membayarnya dan boleh membayar secara berangsur-angsur sampai tiga tahun. *Diyatnya* berupa 100 ekor unta, dengan perincian: 20 ekor unta betina usia 1-2 tahun, 20 ekor unta betina usia 2-3 tahun, 20 ekor unta jantan usia 2-3 tahun, 20 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 20 ekor unta betina usia 4-5 tahun. Dan tiap akhir tahun harus dibayar sepertiganya.

- b. *Kifarat*, yaitu memerdekakan budak muslim tanpa cacat, bilamana pelaku tidak dapat memenuhinya maka diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
3. Pembunuhan semi disengaja atau serupa dengan kesengajaan mengharuskan pembunuhnya untuk membayar *diyat* berat, yaitu: seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahu, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh.

E. Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya menurut Hukum Islam

Di dalam Islam anak merupakan hasil kerja terbaik dari orang tua sehingga setiap anak mempunyai keistimewaan tersendiri. Allah bahkan menegaskan bahwa keberadaan anak adalah anugerah tersendiri bagi orang tua sehingga para orang tua tidak boleh berusaha menghilangkan nyawa anaknya karena takut miskin hanya karena adanya anak. Allah sangat menjamin keberadaan setiap anak-anak yang lahir di dunia ini sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak dapat melindungi anaknya dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِلَيْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: *Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S Al An'am:151)*

Hukum Pidana Islam mengartikan pembunuhan anak adalah pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya walaupun anak itu masih berbentuk gumpalan daging, janin, balita maupun sudah dewasa bahkan walaupun terpisahnya janin ini kadang-kadang dalam keadaan hidup dan kadang pula dalam keadaan meninggal tapi tindakan ini sudah dianggap sempurna ketika janin sudah terpisah dari ibunya.

Secara umum, pembunuhan anak di dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pembunuhan Anak Sengaja
2. Pembunuhan Anak Tidak Sengaja

Unsur pembeda bagi kedua macam pembunuhan diatas adalah pada pembunuhan sengaja terdapat unsur niat untuk membunuh korban sedangkan pada pembunuhan anak tidak sengaja tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi malah berakibat hilangnya nyawa anak. Pada dasarnya, kedua macam pembunuhan anak di atas unsur-unsurnya meliputi:

1. Hilangnya nyawa
2. Anak, artinya sejak dia terpisah dari janin ibunya sampai dewasa.
3. Pelakunya adalah orang tua kandungnya.

Di dalam hukum Islam hukuman utama untuk tindak pidana pembunuhan adalah *qishas* atau balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat kepada orang lain, namun kali ini didalam salah satu syarat wajib *qishas* mengatakan bahwa orang tua tidak dihukum *qishas* dengan sebab membunuh anaknya tetapi mendapat hukuman berupa *ta'zir*. Dalam syarat wajib *qishas* sendiri menyatakan :

Ayah tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya.
(HR. Baihaqi)

Orang tua tidak *diqishas* dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214).⁴⁰

Hal ini sesuai diperkuat dengan hadis rasulullah S.A.W tentang gugurnya hukuman *qishas* bagi orang tua yang membunuh anaknya, yaitu :

لَدِهِ بِوَالِدٍ لَوْ يُقَادُّ لَا

Artinya : *Bapak tidak dijatuhi hukuman mati (bunuh) sebab membunuh anaknya.*⁴¹

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki penjelasan dari Al-Munawi mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (*qishas*) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Untuk itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, dan Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi.⁴² Sedangkan Imam Malik tidak sependapat dengan hal itu, menurutnya orang tua tetap *diqishash* karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindak

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.431.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Kitab Maqalat Albani Edisi Indonesia Risalah Ilmiah Albani*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h.97.

⁴² *Ibid.*, h.451.

pidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja, yaitu tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mendidik anaknya tapi malah menyebabkan kematian.⁴³

Perbedaan diantara ulama ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kondisi sosial pada masa Imam Syafi'i tidak separah dengan kondisi sosial pada masa Imam Malik, tindakan pembunuhan anak oleh orang tuanya dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat terbayangkan dan tidak mungkin terjadi. Sedangkan pada masa Imam Malik kondisi sosialnya amat parah sehingga pembunuhan anak oleh orang tua bukan menjadi suatu hal yang langka tapi hal itu sering terjadi.

F. Tindak Pidana Pembunuhan atas Janin

Didalam pembunuhan anak termasuk didalamnya adalah pengguguran kandungan atau aborsi yang menurut Abdul Qodir Al Audah, perbuatan itu terjadi dengan 3 (tiga) kemungkinan⁴⁴, yaitu:

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang mengakibatkan gugurnya kandungan. Sebagian para fukaha berpendapat bahwa orang yang mencaci perempuan hamil dengan cacian yang menyakitkan maka ia harus bertanggung jawab secara pidana jika cacian tersebut mengakibatkan keguguran.
2. Dengan perbuatan, seperti memukul atau memberi minum obat sehingga kandungannya menjadi gugur.
3. Dengan sikap tidak berbuat, seperti tidak memberi makan atau minum.

Lebih lanjut, menurut Abdul Qadir Al-Audah tindak pidana pembunuhan atas janin ini bisa disebabkan oleh siapapun, baik ayah, ibu ataupun orang lain walaupun begitu,

⁴³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.280.

⁴⁴ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II dan IV*, (P.T.kharisma Ilmu, 1992) h,100.

pelakunya harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan tidak ada pengaruh karena sudah ada pengaturan hukumannya. Janin-janin akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, seperti didalam firman-Nya:

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh. (QS. At Takwir: 8-9).

Sedangkan mengenai pembunuhan janin, dijelaskan bahwa apabila ada janin yang mati karena adanya jinayah atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan. *Gurrah* dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus dirham, atau sebanyak 100 (seratus) kambing. Dan juga dikatakan besarnya adalah 50 (lima puluh) unta.

Imam Syafi'i mensyaratkan dalam hal janin yang mati di dalam kandungan ibunya, yaitu diketahui bahwa benar-benar sudah terbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, beliau menjelaskan dengan pertanda adanya gambaran bentuk manusia yaitu adanya tangan dan jari-jari. Dan apabila hal itu tidak ada, maka menurut beliau tidak ada tanggungan apa-apa baik itu berupa *gurrah* ataupun *diyat*. Sedangkan apabila seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, maka wajib dalam hal tersebut dua *diyat*, yaitu *diyat* atas si ibu dan *diyat* atas si janin, karena matinya si ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.⁴⁵

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991),h.373.

Para ulama sepakat bahwa dalam hal janin yang mati setelah keluar dari kandungan, selain diwajibkan *diyat* juga diwajibkan *kifarah*. Sedangkan mengenai janin yang mati di dalam kandungan ibunya masih dipertanyakan, namun Imam Syafi'i dan lainnya berpendapat tetap diwajibkan *kifarah*, karena menurutnya *kifarah* diwajibkan dalam perbuatan sengaja maupun karena kesalahan.⁴⁶

Pembayaran *diyat* ini menurut jumhur ulama merupakan pembayaran wajib atas tindak pidana sengaja ataupun tidak disengaja, sedangkan menurut Imam Malik hukuman *qishas* tetap berlaku bagi pembunuhan anak oleh orang tuanya secara sengaja dan tidak sengaja, maka orang tua akan dikenai *diyat mughallazah* atau *diyat* yang diperberat. Tidak seperti tindak pidana pembunuhan biasa yang hukumannya adalah *qishas*, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, didalam tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya hukuman *qisas* tidak berlaku, akan tetapi diganti dengan *diyat* atau pembayaran wajib yang disebut dengan *gurrah* yang artinya mengganti dengan budak laki-laki atau perempuan. *Gurrah* secara bahasa artinya adalah pilihan. Dengan kata lain, *diyat* dapat dibayar dengan budak laki-laki atau perempuan.

⁴⁶ *Ibid*,h.381.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBUNUH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tindak Pidana menurut Hukum Positif

Didalam hukum pidana positif, tindak pidana terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata tindak dan kata pidana. Kata tindak berasal dari bahasa jawa yang berarti perbuatan, kelakuan, sepak terjang sedangkan kata pidana artinya adalah kejahatan, kriminal dan pelanggaran.⁴⁷

Istilah tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa belanda yang merupakan istilah yang sering dipakai dalam KUHP. Ada banyak pendapat mengenai pengertian dari tindak pidana, diantaranya:

1. Hazewinkel-Suringa telah membuat teori yang menyatakan rumusan umum dari *strafbaarfeit* adalah suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴⁸
2. Simmons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁹
3. Moelyatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang

⁴⁷ WJS Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.1074.

⁴⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1997), h.181.

⁴⁹ Ibid, h.182.

mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰

Dilihat dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sarjana hukum maka dapat disimpulkan bahwa *Strafbaar Feit* atau tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum dan diancam dengan pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Simmons, unsur-unsur dari tindak pidana di dalam hukum positif adalah:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵¹

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur yang lahir dari suatu perbuatan adalah:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Unsur yang memberatkan pidana.
4. Sifat melawan hukum dilihat dari perbuatannya atau objektif artinya perbuatannya sendiri sudah mencerminkan perbuatan melawan hukum tanpa harus dijelaskan lagi atau dibuat unsur lagi.
5. Sifat melawan hukum dilihat dari pelakunya atau subjektif. Dalam hal ini yang dimaksud adalah niat atau maksud dari pelaku.

⁵⁰ Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.54.

⁵¹ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.88.

Didalam hukum pidana positif, terdapat beberapa fase yang terjadi sebelum munculnya teori mengenai hukuman. Fase-fase tersebut adalah:

1. Fase balasan perseorangan atau individu, pada fase ini penuntutan hukuman terletak pada keluarga korban atau walinya atas dasar naluri membalas terhadap orang yang telah menyerang mereka. Pada fase ini tidak terdapat batasan sehingga terkadang pembalasannya melebihi dari perbuatan yang dilakukan.
2. Fase balasan Tuhan, yaitu pelaku harus menebus kesalahannya dengan tujuan agar pelaku merasa kapok dan orang lain tidak meniru perbuatannya, akan tetapi fase ini menyebabkan terlalu mudahnya menetapkan hukuman mati atas orang lain sehingga unsur keadilannya tidak terjaga.
3. Fase kemanusiaan, pada fase ini sudah mulai diterapkan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri pelaku.
4. Fase keilmuan, didalam fase ini terdapat 3 (tiga) aliran dari Italia, yaitu:
 - a. Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan tindak pidana dan mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk meniru perbuatannya.
 - b. Penjatuan hukuman harus berdasarkan pengamatan ilmiah dan praktis serta kenyataan yang terjadi, seperti faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana.
 - c. Kegiatan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana selain kepada pelakunya juga kepada kondisi-kondisi yang menimbulkan tindak pidana.
5. Teori gabungan adalah teori yang muncul sesudah fase keilmuan dan teori inilah yang dipakai pada masa sekarang dalam penjatuan hukuman. Menurut teori ini hukuman mempunyai 2 (dua) tugas, yaitu:

- a. Mewujudkan prinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besar dan bahaya dari tindak pidana itu sendiri.
- b. Membela masyarakat dengan cara mendasarkan hukuman pada kecondongan pelaku melakukan tindak pidana serta keadaanya yang membahayakan.⁵²

Adanya sanksi merupakan wujud dari norma hukum. Keberadaan sanksi adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentatati aturan-aturan yang berlaku. Tujuan adanya sanksi adalah:

1. Alat pemaksa, pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh seseorang.
2. Merupakan akibat hukum bagi orang yang melanggar norma hukum.⁵³

Keberadaan sanksi merupakan senjata dalam menjaga ketertiban didalam masyarakat. Adanya suatu pelanggaran atau kejahatan maka penentuan sanksi akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Penentuan ini diserahkan kepada negara dan dalam hal ini adalah diserahkan kepada hakim. Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut :

1. Pidana pokok, meliputi:
 - a. Pidana mati, pidana ini adalah pidana terberat diantara semua pidana.
 - b. Pidana penjara, adalah hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ini lebih berat daripada hukuman kurungan karena diancamkan atas berbagai kejahatan. Hukuman penjara minimum 1 (satu) hari dan maksimum penjara seumur hidup.

⁵² Wiryono Prodjodikiro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2002), h.192.

⁵³ S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Alumni Ahaem-petehaem,1996), h.28.

- c. Pidana kurungan adalah hukuman yang lebih ringan daripada hukuman penjara karena merupakan ancaman untuk pelanggaran atau kejahatan karena kelalaian. Lamanya hukuman kurungan dibatasi paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pidana denda, hukuman denda ini dapat diancamkan selain pada pelaku pelanggaran juga pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Hukuman denda ini dapat dilunasi oleh siapapun, baik dari pihak keluarga atau kenalan.⁵⁴

2. Pidana tambahan, meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam pasal 35 KUHP. Lamanya pencabutan hak tersebut diserahkan kepada keputusan hakim.
- b. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP.
- c. Pengumuman putusan hakim, bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum dan prosedurnya diatur di dalam KUHP pasal 43.⁵⁵

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Didalam hukum pidana positif, pada hakikatnya tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pembagian ini muncul didalam KUH Belanda pada tahun 1886 yang kemudian tetap ada pada KUHP Indonesia pada tahun 1918. Dasar pembedaan ini menurut para sarjana karena sejak semula dapat dirasakan mana perbuatan yang

⁵⁴ *Ibid.*, h.29.

⁵⁵ *Ibid.*, h.33.

bertentangan dengan hukum sebelum para pembuat undang-undang menyatakannya didalam undang-undang atau disebut dengan delik hukum, dan mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah dinyatakan didalam undang-undang atau disebut juga dengan delik undang-undang. Pembeda lainnya adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Dalam tindak pidana kejahatan, diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati sedangkan untuk tindak pidana pelanggaran diancam dengan sanksi yang ringan. Namun dalam perkembangannya telah terjadi kesulitan dalam pembedaannya antara kejahatan dan pelanggaran karena baik kejahatan maupun pelanggaran dapat diancam dengan pidana penjara atau pun denda.⁵⁶

Kriteria pembagian tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran pada akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan diantara para ahli sarjana hukum sehingga muncullah pembagian-pembagian tindak pidana berdasarkan jenis-jenis tertentu, yaitu:

1. Cara perumusannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Delik formal adalah tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan itu.
 - b. Delik materiil adalah tindakan yang selain dilarang juga harus ada akibat yang timbul dari tindakan tersebut sehingga dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sepenuhnya.
2. Cara melakukan tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Delik komisi adalah tindakan aktif (*active handling*) yang dilarang dan untuk pelanggarnya diancam pidana.
 - b. Delik omisi adalah tindakan yang pasif (*passive handling*). Tindakan yang diharuskan untuk dilakukan dan jika tidak dilakukan akan diancam dengan pidana.

⁵⁶ SR Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem, 1996), h.226

- c. Delik campuran adalah tindakan yang terdiri dari tindakan komisi dan tindakan omisi sekaligus.
3. Dilihat dari ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutannya
Delik mandiri adalah jika tindakannya hanya dilakukan satu kali saja sedangkan delik berlanjut atau sama yang berulang adalah jika tindakan yang sama dilakukan berulang.
4. Dilihat dari berakhir atau berkesinambungan suatu delik
Delik berakhir atau selesai adalah delik dengan melakukan sesuatu perbuatan sedangkan delik berkesinambungan adalah delik yang terjadi karena meneruskan sesuatu yang dilarang.
5. Dilihat dari tindakan itu merupakan kebiasaan atau tidak
Delik yang merupakan kebiasaan adalah delik yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan sedangkan yang dimaksud dengan delik yang bukan kebiasaan adalah delik sebagai pekerjaan artinya satu perbuatan saja sudah cukup.
6. Dilihat dari hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan pidana
Hal-hal yang dapat memberatkan pidana seperti pencurian dengan penganiayaan sehingga ancaman hukumannya dapat diperberat sedangkan hal-hal yang meringankan seperti pelaku menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya.
7. Dilihat dari bentuk kesalahan dari pelaku, dibagi sebagai delik sengaja atau delik alpa.
8. Dilihat dari tindakan tersebut mengenai hak hidup negara, ketatanegaraan atau pemerintahan. Yang dimaksud dalam delik ini adalah adanya perbedaan antara delik umum dengan delik yang berkaitan dengan politik atau pemerintahan.
9. Dilihat dari perbedaan subjek
- a. Delik Khusus (*delict proporia*) adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu.

- b. Delik Umum (*commune delicten*) adalah delik yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa mensyaratkan adanya kualitas tertentu.
- 10. Dilihat dari cara penuntutan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.
 - b. Delik tanpa aduan (*gewone delicten*) adalah delik yang dapat dituntut tanpa perlu menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan.

C. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Positif

Tindak pidana pembunuhan didalam KUHP masuk dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁵⁷ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁵⁸ Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

⁵⁷ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.55.

⁵⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h.129.

a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1) Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah orang lain.
- 2) Unsur subjektif : dengan sengaja.⁵⁹

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁶⁰

Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenakan sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.⁶¹

b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh bentuk tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

⁵⁹ P.A.F Laminating, *op.cit*, h.17.

⁶⁰ Moeljatno, *KUHP* , h.147.

⁶¹ *Ibid* ., h.35.

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.⁶²

Unsur-unsur yang terdapat pada pembunuhan jenis ini adalah:

- 1) Semua unsur yang ada pada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
- 2) Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
- 3) Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapaknya dengan cara melawan hukum.

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain : dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran

⁶² Moeljatno, *KUHP*, h.147.

dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.⁶³ Sedangkan, M.H. Tirta amidjaja mengutarakan direncanakan lebih dahulu antara lain sebagai: bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.⁶⁴

Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
- 2) Unsur subjektif : dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.

d. Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.⁶⁵

Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya ibunya harus didasarkan atas suatu alasan

⁶³ Leden Marpaung ,*op.cit*, h.31.

⁶⁴ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta, Fasco, 1995), h.85.

⁶⁵ Moeljatno, *op.citP.*, h.147.

(*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.⁶⁶

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan.

e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.⁶⁷

Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa
- 2) Objeknya adalah nyawa orang lain
- 3) Atas permintaan dari korban itu sendiri
- 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh

Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa). Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana

⁶⁶ Chidir Ali, *op.cit* ., h.76.

⁶⁷ Moeljatno, *op.cit* , h.147-148

penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri.

- f. Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri pasal 345 KUHP

Pada tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur objektif : perbuatannya adalah mendorong, menolong atau memberikan sarana kepada orang untuk bunuh diri dan kemudian orang tersebut jadi bunuh diri.
- 2) Unsur subjektif : dengan sengaja.

- g. Pembunuhan kandungan atau pengguguran pasal 346-349 KUHP

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi :

- 1) Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun
- 2) Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348)
- 3) Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat, baik atas persetujuannya atau tidak.

2. Kejahatan terhadap nyawa dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), terdapat pada pasal 359 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kelalaian atau *culpa* dalam bentuk kurang hati-hatian.
- b. Adanya wujud perbuatan tertentu
- c. Adanya kematian orang lain

d. Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁶⁸

Atas dasar objeknya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, yang dimuat dalam pasal 338-340 dan pasal 344-345)
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, terdapat dalam pasal 341-343
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibunya atau janin, terdapat dalam pasal 346-349.

Sedangkan sanksi pembunuhan dalam hukum pidana positif pada intinya adalah:

1. Pembunuhan sengaja dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP :
Barang siapa sengaja merampas nyawa oranglain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP :
Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa oranglain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.
3. Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam pasal 359 KUHP :
Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.⁶⁹

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut. Pembunuhan sengaja merupakan

⁶⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002),h.56-126.

⁶⁹ *Ibid.*, h.35.

bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana sangat terkait dengan batin dari si pelaku. Hal yang paling membedakan antara pembunuhan tidak sengaja dengan dua bentuk pembunuhan lainnya adalah tidak adanya niat dari pelaku untuk mengakibatkan matinya seseorang dan juga adanya unsur kelalaian sehingga menyebabkan ancaman hukumannya pun jauh lebih ringan daripada dua bentuk pembunuhan lainnya.⁷⁰

D. Tindak Pidana Pembunuhan Anak menurut Hukum Positif Indonesia

Anak di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai bermacam-macam batasan. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melihat batasan pengelompokkan anak dari segi umur. Mengenai anak, yang dimaksud dengan anak disini adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.⁷¹

Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan KUHP dari segi pidana dan KUH Perdataan, diantaranya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah awalnya dimana anak dibahas pada Bab IX pasal 42-47, UU No. 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁰ S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Alumni Ahaem petehaem,1996), h.28.

⁷¹ Muhammad Taufik Makaro, Letkol.Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h.1.

Menurut Wirjono Prodjodikiro dalam buku Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, pembunuhan anak adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Pembunuhan untuk anak selanjutnya dibahas pada pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan. Hal yang sama juga dicantumkan pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adanya bentuk-bentuk dari tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya ini menimbulkan ancaman hukuman yang berbeda-beda pada tiap-tiap bentuk dari tindak pidana tersebut, diantaranya adalah:

1. Pembunuhan anak biasa (*kinderdosslag*) pada pasal 341 KUHP dan berencana (*kindermood*) pasal 342 KUHP. Masing-masing diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun. Pasal ini hanya dikenakan pada ibu sebagai pelakunya dengan motif takut akan diketahui oleh orang lain tentang keberadaan anaknya dan jika pelakunya adalah ayahnya maka pasal yang akan dikenakan adalah pasal pembunuhan biasa (pasal 340) dengan ancaman hukuman masing-masing pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.
2. Pengguguran kandungan atau aborsi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dalam ancaman hukum ini ringan dibandingkan dengan bentuk pembunuhan biasa karena pada pembunuhan biasa unsur yang paling utama adalah membunuh anak yang keluar dalam keadaan hidup.
3. Pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan penganiayaan atau kekerasan, pada KUHP diancam dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan 9 (sembilan) tahun

pada berencana. Selain itu, KUHP juga mengkhususkan tindakan tersebut dengan unsur pelaku dengan diperberat 1/3 (sepertiga) ketika pelakunya adalah orang tuanya sendiri seperti yang telah diatur dalam pasal 356: pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambahkan dengan 1/3 (sepertiga) bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.

Dasar atas pasal 356 adalah :

- 1) Bahwa sebagai pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan terhadap anggota keluarga.
- 2) Bertujuan untuk melindungi kerukunan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga.
- 3) Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya menghormati dan menjaga satu sama lainnya.

Selain dalam KUHP, juga diatur secara khusus pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula jika pelakunya adalah orang tua dari si anak. Ketika kematian anak itu disebabkan karena orang tuanya sendiri maka hukumannya pun juga diperberat jika menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan pasal 80 ayat (4) menyatakan pidana ditambahkan 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut orang tuanya.⁷²

Mengenai pembunuhan anak yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan

⁷² S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Alumni Ahaem-petehaem,1996), h.35.

kekerasan, kekejaman atau penganiayaan.⁷³ Sehingga hal diatas menunjukkan bahwa ketika orang tua yang seharusnya melindungi anaknya ternyata malah menyakiti anaknya maka itu merupakan tindakan yang sangat kejam sehingga orang tua harus diperberat hukumannya daripada orang lain yang melakukannya.



⁷³ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2003), h.19.

BAB IV

A. Ketetapan Sanksi Hukum Positif Indonesia terhadap Pelaku Pembunuhan Anak oleh Orang tuanya

Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan KUHP dari segi pidana dan KUH perdata dari segi keperdataan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah awalnya di mana anak dibahas pada Bab XI pasal 42-47 kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak dan terakhir adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷⁴

Kesejahteraan dan perlindungan anak bukan masalah milik orang tua saja tetapi juga milik semua elemen di dalam masyarakat. Di dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara dan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak
4. Menjamin penyelenggaraan perlindungan anak
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya alam menyampaikan pendapat.⁷⁵

⁷⁴ Wirjono Prodjodikiro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2003), h. 67

⁷⁵ Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 156.

Mengenai pembunuhan anak yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80 ayat (3) menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan. Hal yang sama juga dicantumkan pada UU No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷⁶

Ketika kematian seorang anak itu disebabkan oleh orang tuanya sendiri maka ancaman hukumannya pun diperberat pada pasal 80 ayat (4) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan anak juga diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dibagi menjadi :

1. Pembunuhan Anak Biasa (*kinderdooslag*) pada pasal 341 : seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dilihat dari isi pasal diatas, maka unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana diatas adalah :

- a. Dilakukan dengan sengaja, dengan penuh kesadaran dan tahu akan akibat perbuatannya.
- b. Oleh ibu kepada anaknya.
- c. Pada waktu sedang atau tidak lama setelah dilahirkan.
- d. Anaknya merupakan anak kandung.
- e. Motifnya adalah takut akan diketahui oleh orang lain mengenai keberadaan anak tersebut.

⁷⁶ *Ibid*, h.19.

2. Pembunuhan Anak Berencana (*kindermoord*) pada pasal 342 :

seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pembunuhan anak berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. indikasinya adalah adanya tenggang waktu yang cukup untuk dapat berfikir kembali.
- b. Oleh ibu kepada anaknya.
- c. Anak merupakan anak kandungnya sendiri.
- d. Pada saat sedang atau tidak lama setelah dilahirkan.
- e. Bermotif takut diketahui keberadaan anaknya yang baru dilahirkannya.⁷⁷

Pada unsur pada saat sedang melahirkan diartikan oleh Van Bemmelen sejak sang ibu merasakan akan segera melahirkan anak sedangkan unsur tidak lama setelah dilahirkan diartikan oleh Noyon Langemeyer adalah tenggang waktu ini berhenti ketika sang ibu mulai memutuskan untuk memelihara anaknya.⁷⁸

Kedua pembunuhan diatas, diatur dalam KUHP dan secara jelas dan tegas menyebutkan salah satu unsurnya ialah pelaku adalah ibu kandung dari anak itu sendiri. Keberadaan unsur ini juga berkaitan dengan unsur yang lain, yaitu motif dari tindakan tersebut adalah takut

⁷⁷ Nurmono asmoro, Hendro R, Skripsi *Suatu Tinjauan tentang Pembunuhan Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), h.14.

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h.71.

ketahuan orang lain akan keberadaan anaknya yang baru dilahirkan atau tidak lama dia lahirkan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa ketika seorang ayah yang melakukan pembunuhan tersebut maka si ayah tidak dapat dikenakan pasal 341 atau 342 tetapi diancam dengan pasal 338 (pembunuhan biasa) dan pasal 340 (pembunuhan berencana).

3. Pengguguran Kandungan atau Aborsi pada pasal 346 :
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Persamaan antara pembunuhan anak dan aborsi adalah harus adanya kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan sehingga aborsi dimasukkan ke dalam KUHP dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup lalu kemudian dibunuh sedangkan didalam aborsi apapun yang keluar dari dalam seorang ibu adalah suatu kandungan, baik yang hidup tetapi belum menjadi bayi ataupun sudah dalam keadaan mati. Hal lain yang juga menjadi unsur penting dalam aborsi adalah hal yang mendorong seorang ibu melakukannya atau motifnya tidak diperdulikan sedangkan dalam pembunuhan anak biasa tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa takut akan diketahuinya anaknya lahir.⁷⁹

4. Pembunuhan Anak yang disertai tau didahului dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan pada pasal 351 ayat (3) :
Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

⁷⁹ Wirjono Prodjodikiro *Ibid*, h.72.

Pada bentuk pembunuhan ini dapat dilihat bahwa penganiayaan yang dilakukan pada dasarnya untuk menyakiti korban bukan untuk mengakibatkan kematian pada korban. Walaupun pada akhirnya keduanya mengakibatkan matinya orang lain tetapi pada pembunuhan ini segala tindakan pelaku bertujuan untuk menghilangkan nyawa dari orang tersebut, sedangkan pada penganiayaan tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk menyakiti orang lain, tidak ditujukan pada matinya orang lain.

Selain pada pasal 351 (3) pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan juga diatur pada pasal 353 (3), yaitu dengan tambahan unsur berencana dengan ancaman hukuman 9 (sembilan) tahun penjara.

Selain diatur pada KUHP, tindak pidana pembunuhan anak yang disertai dengan penganiayaan ini juga diatur pada UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 80 :

- (1) setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Melihat isi dari pasal diatas terutama ayat (3) dan ayat (4), maka unsur-unsurnya adalah:

1. Hilangnya nyawa
2. Didahului atau disertai dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan
3. Terhadap anak, dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan
4. Pelaku adalah orang tua dari anak tersebut
5. Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.

Dan juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) :

- (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-; (lima belas juta rupiah).
- (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Isi dari pasal 5 huruf a yang disebutkan pada pasal di atas mengenai larangan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain di dalam lingkup rumah tangganya dan lingkup

rumah tangga yang dimaksud di dalam Undang-undang ini adalah:

1. Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang yang disebutkan pada huruf a, seperti sepupu, ipar, mertua, dan lain-lain.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga yang bersangkutan baik menetap ataupun tidak.

Unsur-unsur yang terdapat pada UU No.23 tahun 2004 mengenai pembunuhan anak adalah:

1. Hilangnya nyawa
2. Didahului dengan kekerasan atau penganiayaan
3. Korban adalah orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga (termasuk didalamnya adalah anak)
4. Pelaku adalah orang yang juga termasuk kedalam lingkup rumah tangga
5. Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.

Persamaan antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah :

1. Tindakan kekejaman yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan.
2. Sebelum mengakibatkan matinya korban didahului dengan adanya kekerasan atau penganiayaan.
3. Motif tidak berpengaruh dalam penetapan hukuman.

Sedangkan perbedaan diantara kedua undang-undang diatas adalah :

1. Pada UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korbannya dengan sangat jelas disebutkan yaitu anak sedangkan dalam UU tentang KDRT korban adalah orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga, dimana anak adalah salah satu bagiannya.

2. Pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan jika pelakunya adalah orang tua dari anak maka hukuman yang diancamkan akan ditambah sepertiga, sedangkan di dalam UU Penghapusan KDRT tidak ada ancaman pemberatan hukuman bagi orang tua yang telah mengakibatkan matinya sang anak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai atau didahului dengan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya *azas lex posteriori derogat lex priori* (peraturan hukum yang baru mengalahkan peraturan hukum yang lama) dan juga *azas lex specialis derogat lex generalis* (peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), maka UU Perlindungan Anak yang berlaku terhadap pembunuhan anak yang disertai atau didahului oleh penganiayaan ini tetapi hal ini tidak berlaku jika kita kaitkan dengan keberadaan UU KDRT yang lahir tahun 2004.⁸⁰

Azas yang berlaku diantara kedua peraturan tersebut adalah *azas lex specialis derogat lex generalis* karena walaupun UU Perlindungan Anak lebih dulu ada daripada UU Penghapusan KDRT akan tetapi UU Perlindungan Anak memiliki pasal-pasal yang bersifat khusus sehingga tidak bisa semua pasal pada undang-undang tersebut diterapkan dengan UU Penghapusan KDRT. Kekhususan tersebut terletak pada pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya. Pada UU Perlindungan Anak, ancaman hukumannya adalah diperberat sepertiga dari hukuman semula yaitu 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga ancaman hukuman yang mengandung 3 (tiga) pilihan, yaitu pidana penjara, pidana denda atau bahkan kedua-duanya, menegaskan betapa kejam dan jahatnya orang tua yang tega menyakiti

⁸⁰ R.S. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Alumni Petchaem, 1996), h.71.

anaknya sampai si anak kehilangan nyawanya sedangkan didalam UU Penghapusan KDRT membahas tindak pidana yang terjadi antar lingkup keluarga tanpa ada pemberatan jika pelakunya adalah orang tua dari anak tersebut.⁸¹

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, berikut adalah skema dari pembahasan ini:

No	Hukum Pidana Positif	
1.	Pengertian Anak	
	KUHP	Anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 (enam belas) tahun. (Pasal 45 KUHP)
	UU Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1)
	UU Penghapusan KDRT	Anak adalah orang yang masih menjadi dalam lingkup rumah tangga, tidak ada batasan umur anak. (Pasal 2 ayat (1))
2	Bentuk-bentuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembunuhan Anak Biasa 2. Pembunuhan Anak Berencana 3. Aborsi 4. Pembunuhan Anak yang disertai/didahului dengan penganiayaan.
3	Sanksi	
	KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembunuhan Anak Biasa : 7 (tujuh) tahun penjara (Pasal 341 KUHP) 2. Pembunuhan Anak

⁸¹ *Ibid*, h.72.

		<p>Berencana : 9 (sembilan) tahun penjara (Pasal 342 KUHP)</p> <p>3. Aborsi : 4 (empat tahun) penjara (Pasal 346 KUHP)</p> <p>4. Pembunuhan Anak yang disertai/ didahului dengan penganiayaan : 7 (tujuh) tahun ditambah pemberatan sepertiga dari ancaman sebelumnya (Pasal 251 KUHP)</p>
	UU Perlindungan Anak	<p>1. Aborsi : 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 1.00.000.000,- (Pasal 77A)</p> <p>2. Pembunuhan Anak : 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda Rp.200.000.000,- (Pasal 80 ayat (3)), diperberat sepertiga, jika pelaku adalah orang tuanya.</p>
	UU Penghapusan KDRT	<p>1. Aborsi : paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,- dan paling banyak Rp.500.000.000,- (Pasal 48)</p> <p>2. Pembunuhan Anak : 15 (lima belas tahun) penjara atau denda Rp. 45.000.000,- (Pasal 44 ayat (3))</p>

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Sanksi Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya menurut Ketetapan Hukum Positif di Indonesia

Pada dasarnya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sebagai pengajaran serta pendidikan, artinya memberikan pelajaran bagi pelaku dan orang lain tentang suatu tindak pidana sehingga dapat menahan orang lain untuk tidak melakukannya.⁸²

Antara hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia berbeda pandangan mengenai sanksi hukumannya. Di dalam hukum Islam hukuman utama untuk tindak pidana pembunuhan adalah *qishas* atau balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat kepada orang lain, namun kali ini didalam salah satu syarat wajib *qishas* mengatakan bahwa orang tua tidak dihukum *qishas* dengan sebab membunuh anaknya tetapi mendapat hukuman berupa *ta'zir*.

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki penjelasan dari Al-Munawi dan juga Imam Syafi'i mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (*qishas*) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua.⁸³ Keberadaan hadis ini diperkuat dengan adanya hadis yang mengatakan bahwa kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sedangkan Imam Malik tidak sependapat dengan hal itu, menurutnya orang tua tetap di*qisas* karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindak pidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja, yaitu tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mendidik anaknya tapi malah menyebabkan kematian.⁸⁴

Perbedaan diantara ulama ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial antara Imam Syafi'i dan

⁸² Ahmad Hanafi, M.A., *Op.Cit*, h.191

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.431

⁸⁴ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.280.

Imam Malik. Kondisi sosial pada masa Imam Syafi'i tidak separah dengan kondisi sosial pada masa Imam Malik, tindakan pembunuhan anak oleh orang tuanya dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat terbayangkan dan tidak mungkin terjadi. Sedangkan pada masa Imam Malik kondisi sosialnya amat parah sehingga pembunuhan anak oleh orang tua bukan menjadi suatu hal yang langka tapi hal itu sering terjadi.

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut KUHP adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan secara yuridis pembunuhan diatur dalam Bab XIX KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa mulai dari pasal 338 sampai pasal 350, dan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pada pasal 80 ayat (3) dan (4). Mengenai sanksi pidana yang diterapkan pada pembunuhan anak dengan adanya pemberatan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya menegaskan bahwa adalah kewajiban orang tua untuk menjaga dan melindungi anaknya dan akan sangat jahat dan kejam ketika kewajiban itu malah menyebabkan seorang anak kehilangan nyawanya walaupun pemberatan itu pun dirasa masih kurang adil bagi anak-anak yang kehilangan nyawa ditangan orang tua kandungnya sendiri.⁸⁵

Dalam hal ini, penulis tetap mengacu pada ditegakkannya suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, alasan yang mendasari hal itu adalah pertama karena sistem negara ini sudah tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan Islam yang mana jika ada tindak pidana tidak dihukum secara Islam namun dihukum menurut undang-undang dapat juga diartikan karena negara yang jadi acuan saat ini adalah undang-undang dasar, maka kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan alasan yang kedua karena

⁸⁵ Irma Setyowati, Soematri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.96.

jika kebijakan suatu hukum tidak diberlakukan maka akan terjadi lagi perlakuan-perlakuan pidana lain, seperti dalam bukunya Sianturi Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, yang menyatakan tujuan ditegakkannya suatu sanksi sendiri merupakan suatu norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyepelekan setiap tindakan atau tingkah laku. Untuk itulah penulis mengacu pada ditegakkannya suatu hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya tidak terjadi lagi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat didalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada hukum pidana positif di Indonesia dengan adanya KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT, menghasilkan sanksi yang berbeda-beda pada pelaku tindak pidana pembunuhan anak.
 - a. Sanksi hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan aborsi:
KUHP : dipidana 4 (empat) tahun penjara.
UU Perlindungan Anak : dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.00.000.000,-
UU Penghapusan KDRT : paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-.

Persamaan dari sanksi hukuman bagi orang tua yang melakukan aborsi yaitu :

- 1) sama-sama dilakukan oleh seorang ibu hamil
- 2) dilakukan dengan sengaja
- 3) sadar dengan akibat dari perbuatannya.

Perbedaan dari sanksi hukuman bagi orang tua yang melakukan aborsi yaitu

- 1) Dalam KUHP motif yang menjadi tujuan dilakukan tindak pidana tersebut jelas sedangkan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT tidak dijelaskan motif dilakukannya tindak pidana tersebut.
- 2) Dalam KUHP yang membantu melakukan aborsi (dokter, bidan atau juru obat) dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat dari pada pelaku

sedangkan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT yang membantu hukumannya lebih ringan.

- b. Sanksi hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya :

KUHP : dipidana paling singkat 7 (tujuh) tahun penjara dan paling lama 9 (sembilan) tahun penjara.

UU Perlindungan Anak : 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda Rp.200.000,000,- . dan diperberat sepertiga, jika pelaku adalah orang tuanya.

UU Penghapusan KDRT : dipidana 15 (lima belas) tahun penjara atau denda Rp.45.000.000,-.

Persamaan dari sanksi bagi orang tua yang membunuh anaknya adalah:

- 1) Tindakan kekejaman yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan.
- 2) Anak yang dibunuh merupakan anak kandung.
- 3) Sebelum mengakibatkan matinya korban didahului dengan adanya kekerasan atau penganiayaan.
- 4) Motif tidak berpengaruh dalam penetapan hukuman

Perbedaan dari sanksi bagi orang tua yang membunuh anaknya adalah:

- 1) Pada KUHP ada bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan anak yang mempunyai sanksi yang berbeda-beda.
- 2) Pada UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korbannya dengan sangat jelas disebutkan yaitu anak sedangkan dalam UU tentang Penghapusan KDRT korban adalah orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga, dimana anak adalah salah satu bagiannya.
- 3) Pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan jika pelakunya adalah orang tua dari anak maka hukuman yang diancamkan akan ditambah sepertiga, sedangkan di dalam UU

Penghapusan KDRT tidak ada ancaman pemberatan hukuman bagi orang tua yang telah mengakibatkan matinya sang anak.

2. Perspektif hukum Islam terhadap sanksi hukum pada orang tua yang membunuh anaknya berbeda dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Di dalam ketentuan hukum pidana Islam, orang tua yang membunuh anaknya tidak *diqishas* karena orang tua menjadi sebab adanya anak, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang, karena itu orang tua tetap mendapat hukuman yaitu berupa *ta'zir*. Namun karena negara ini tidak menerapkan sistem pemerintahan Islam jadi jika ada tindak pidana yang terjadi tidak dihukum secara Islam namun dihukum menurut undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Dari skripsi yang telah dibuat ini, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua karena ini merupakan gambaran sudah betapa rusaknya dan susahny kehidupan rakyatnya sehingga banyak orang tua yang membunuh anaknya hanya karena masalah sepele atau karena terhimpit masalah ekonomi.
2. Untuk aparat hukum di Indonesia, dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya seharusnya dapat memudahkan para aparat untuk mempidana pelaku sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Semarang: Asy-Syifa', 2008.
- Al-Jaziri, WA Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah V*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (cet. ke-3, jil. VI)*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Audah, Abdul Qadir . *At-Tasyri'i al - Jina'i al -Islami (jil. II)* . Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992.
- , *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami vol.1*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1992.
- Chazawi, Ahmad. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- . *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2011.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: P.Trja Grafindo Persada, 2010.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Jinaya (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997.

Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika PressIndo, 1995.

Hadi Kusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana Cet. Ke 4*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ibn Al Husain, Abi Ya'la Muhammad, *Al Ahkam As Sulthaniyah (cet. III)*. Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad, 1994.

KansilL, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Cet. III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, 1990.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah (cet. III)*. Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1993.

Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Cet.22*. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa Al 'Uqbah fi Al fiqh Al Islamiy*. Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 1992.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Taufik Makaro, Letkol. Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Nurmono Asmoro, Hendro R, *Skripsi Suatu Tinjauan tentang Pembunuhan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.

Poerwadarmita, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditma, 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011.

Sianturi, S.R, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaempeteaem, 1996.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syaltut, Mahmud. *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah (cet.III)*. Dar Al Qolam, 1996.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1995.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

WEBSITE

<http://daerah.sindonews.com/read1074862/21/seorang-ayah-di-ciamis-bunuh-anak-kandung-1452071737> di akses pada tanggal 29 juli 2016

http://googleweblight.com/?lite_url=http://imansyah.blogspot.com/2011/12/makalah-studi-kasus-tindak-pidana.html?m%3D1&ei=wQZfNgWg&lc=id- diakses tanggal 19 desember 2016.